

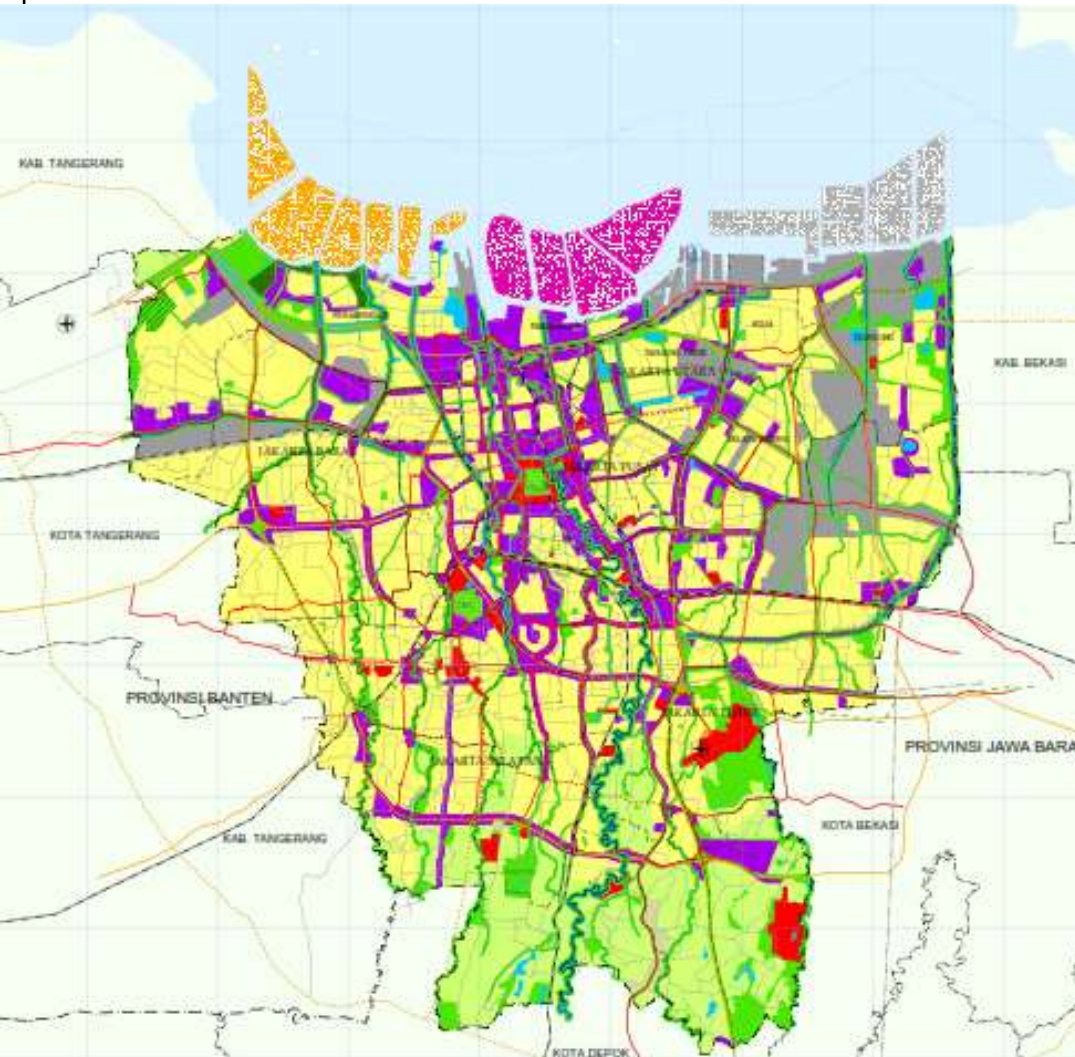


Pengembangan Pantura Jakarta

**Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Pada FGD Reklamasi Wilayah Perairan sebagai Alternatif
Kebutuhan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Sinkronisasi
dengan Rencana Tata Ruang**

**12 Februari 2014
Jakarta**

Kondisi Umum DKI Jakarta



- Luas Jakarta:
Darat: 661.52 km²
Lautan: 6.977 km²
jadi banjir dari laut (merah)
yang parah dari hujan lokal dan sungai (biru)
- Penduduk:
12 juta (siang)
9.7 juta (malam)
- Total penduduk Jabodetabek ± 27 juta Jiwa
- 40% wilayah utara Jakarta berada di bawah muka laut pasang
- Jakarta merupakan *Delta City* (dilalui oleh 13 sungai yang berasal dari wilayah di luar Jakarta dan bermuara di Teluk Jakarta) serupa dengan beberapa kota besar didunia seperti Rotterdam, Tokyo, New York, London, Shanghai, Hongkong, Melbourne, Toronto

Gagasan Reklamasi



Latar Belakang Masalah

Dalam RTRW, salah satu pengembangan Jakarta ditetapkan ke arah utara

- Degradasi Kualitas Lingkungan
- Kecenderungan pembangunan yang meninggalkan pantai
- Keterbatasan lahan daratan Jakarta
- Masalah-masalah lainnya seperti kenaikan muka air laut, banjir rob dan land Subsidence

Gagasan

- Mewujudkan suatu Kawasan Reklamasi Water Front City sebagai Kawasan Strategis Provinsi
- Dengan konsep Subsidi Silang antara kegiatan Reklamasi dengan Peningkatan Kualitas Daratan (Pantai Lama)



Pengembangan Kawasan Pantai Utara Jakarta



1. Kawasan Strategis Provinsi Pantura Jakarta (jangka pendek)
2. National Capital Integrated Coastal Defence/NCICD (jangka panjang)

Dibangun melalui kerjasama antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat

Sesungguhnya telah dimulai sejak lama.....



1995

- Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta
- Perda No. 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta

1996

- SK. Gubernur DKI Jakarta No. 1090 Tahun 1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengendali Reklamasi Pantura Jakarta

1997

- Kepmeneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. KEP.920/KET/10/1997 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta

1998

- SK. Gubernur DKI Jakarta No. 220 Tahun 1998 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Reklamasi Pantura Jakarta (jo. SK. Gub. No. 972 Tahun 1995)

1999

- Perda No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta

2000

- SK. Gubenur DKI Jakarta No. 138 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta

2008

- Perpres Nomor 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur

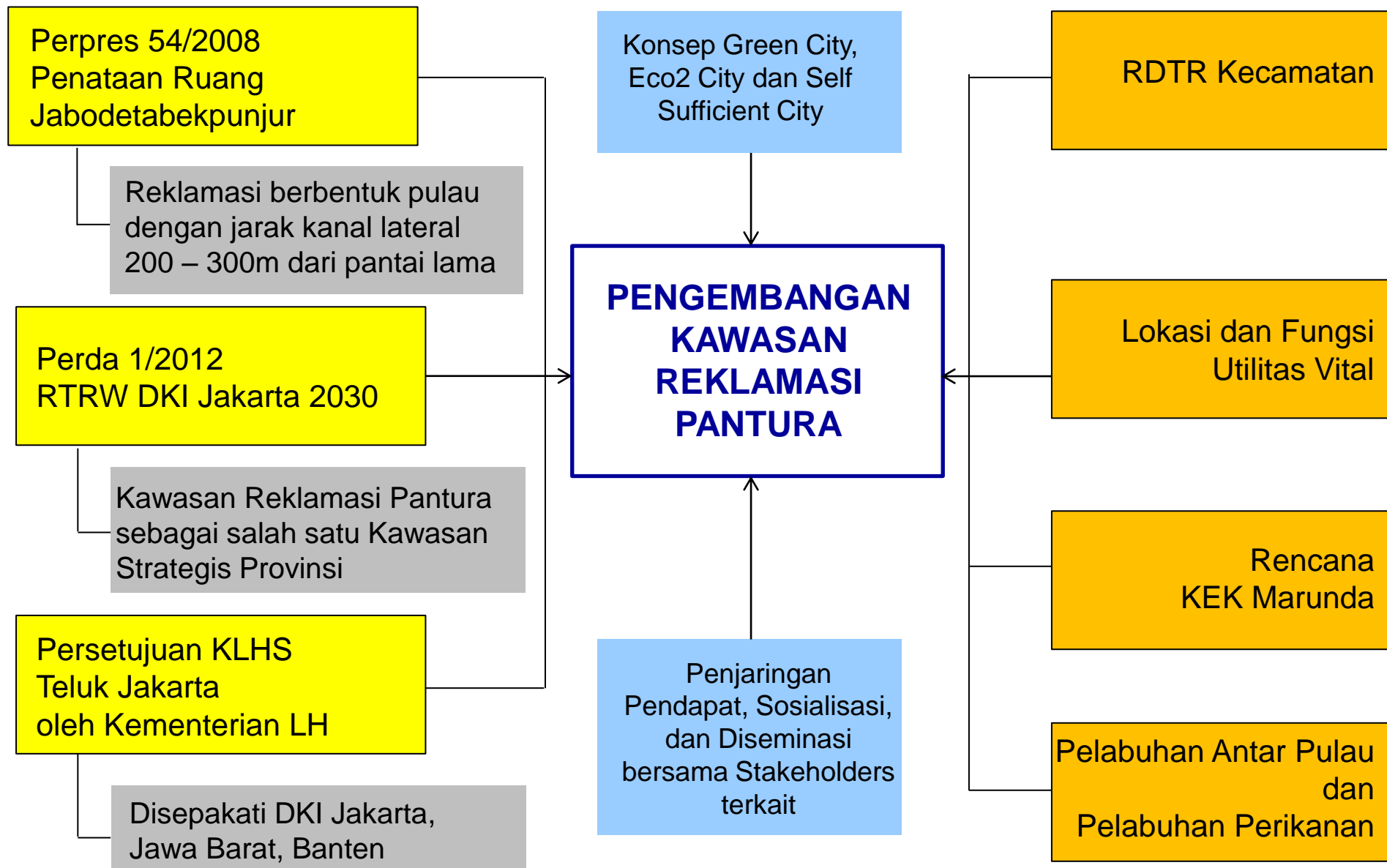
2010

- Persetujuan KLHS Teluk Jakarta oleh Kementerian LH (Disepakati oleh 3 provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten)

2012

- Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang RTRW DKI Jakarta 2030
- Pergub Nomor 121 tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta

Pendekatan Pengembangan Kawasan Strategis Pantura



Prinsip Dasar



- Eco2 City
- Self-Sufficient City
- Zero-Waste City
- Green Infrastructure
- Green Design
- Green Building



Nilai Tambah Kawasan Strategis Pantura



Pengembangan Kawasan Reklamasi harus mampu **menghasilkan nilai tambah untuk revitalisasi daratan pantai lama melalui subsidi silang** yang diwujudkan dengan program-program sebagai berikut:

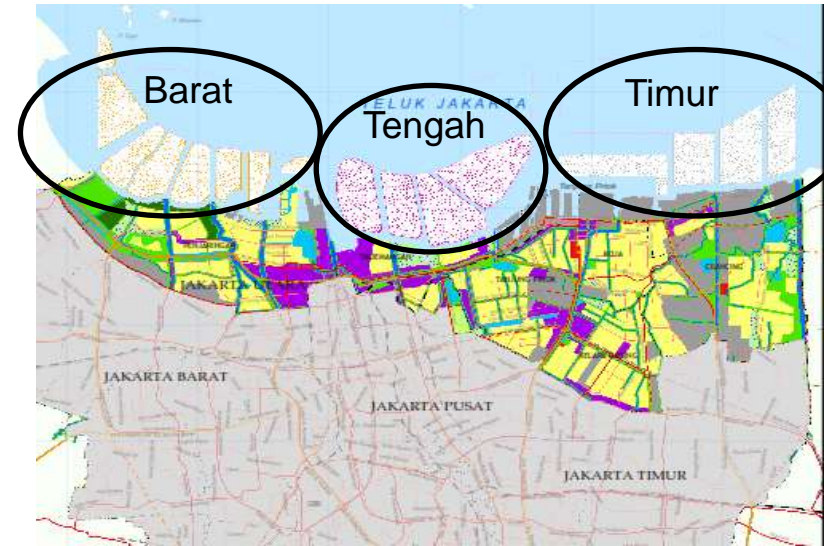
- Penyediaan perumahan (rusunawa) untuk masyarakat
- **Pengerukan dan Pembangunan waduk di Daratan Jakarta**
- **Pengerukan sedimentasi di sungai di Daratan Jakarta**
- Pembangunan tanggul pantai dan sungai di daratan Jakarta
- Penataan sistem drainase di Daratan Jakarta
- Penyediaan lapangan kerja bagi para penduduk di kawasan Jakarta Utara sehingga tercipta peningkatan taraf hidup penduduk.



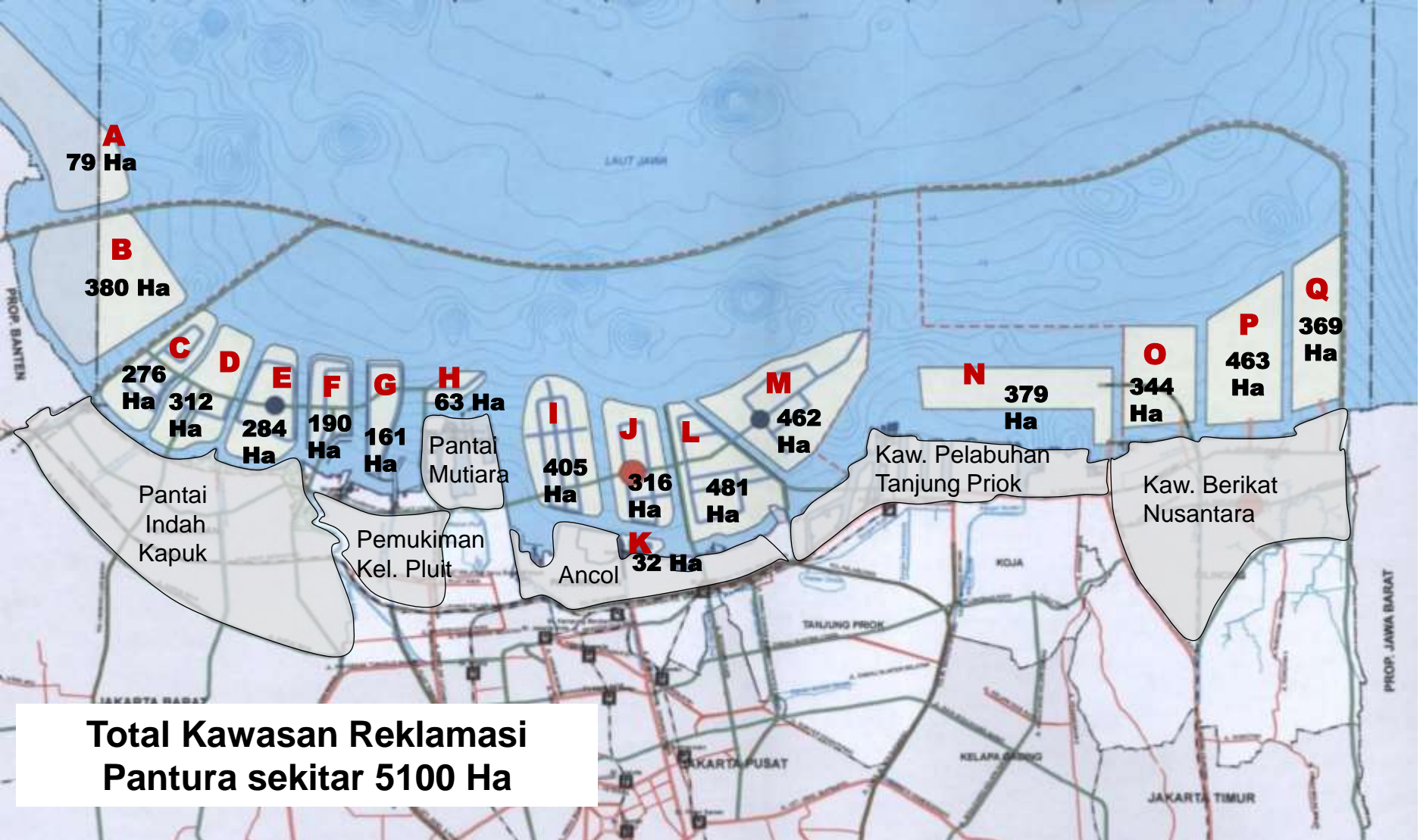
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Reklamasi



- Kawasan Reklamasi dibagi atas 3 (tiga) sub-kawasan:
 - a. Barat: permukiman dengan intensitas sedang, kegiatan rekreasi/wisata dan kegiatan komersial secara terbatas.
 - b. Tengah: pusat perdagangan/jasa skala internasional, pusat rekreasi/wisata dan permukiman dengan intensitas tinggi.
 - c. Timur: pusat distribusi barang, pelabuhan, industri/ pergudangan serta permukiman dengan intensitas rendah sebagai penunjang.
- Dikembangkan bagi penduduk malam maksimal 750.000 jiwa
- Setiap pulau wajib mengembangkan RTH seluas minimal 30% dan RTB seluas minimal 5%.
- Dikembangkan serasi dengan kawasan lindung dan hutan bakau di pantai lama.
- Setiap pulau reklamasi wajib menyediakan kawasan pantai publik
- Sistem dan jaringan utilitas dilaksanakan secara mandiri dan tidak membebani daratan



Rencana Kawasan Reklamasi



**Total Kawasan Reklamasi
Pantura sekitar 5100 Ha**

Tahapan Perizinan



IZIN PRINSIP (Berlaku 1 tahun)

Mensyaratkan pembuatan:

- UDGL (rekomendasi oleh DTR)
- Amdal (rekomendasi oleh BPLHD)
- Kajian Pengambilan Material (rekomendasi oleh DPE)
- IMP (rekomendasi oleh DPU)

IZIN PELAKSANAAN (Berlaku 2 tahun)

Memuat kewajiban pengembang secara umum / makro

PERJANJIAN PEMENUHAN KEWAJIBAN

Memuat kewajiban pengembang serta jadwalnya secara teknis dan terukur

IZIN PEMANFAATAN RUANG

Penerapan UDGL yang memuat :

Rencana Trace, RTLB , Peil Bangunan, IMB, Amdal, IMP, Izin dermaga, Izin-izin lainnya sebagaimana proses perizinan di daratan

Kewajiban Mitra Pengembang



Kewajiban dasar

- 1. Infrastruktur dasar di Kawasan Pantura**
(jalan, angkutan umum massal, utilitas, pengendali banjir, RTB, RTH, sempadan pantai, pengerukan sedimentasi di muara sungai)
- 2. Infrastruktur di Daratan Jakarta pendukung Kawasan**
(jalan akses langsung ke Kawasan Reklamasi)
- 3. Lahan seluas 5% (nett) per Pulau Reklamasi**
- 4. Pemindahan jalur pipa dan kabel bawah laut** bagi pulau yang berdekatan

Subsidi silang untuk Revitalisasi Daratan

- 1. Pengerukan dan Pembangunan waduk** di Daratan Jakarta
- 2. Pembangunan Rusunawa** di Daratan Jakarta sebanyak 1000 blok
- 3. Pengerukan sedimentasi** di sungai di Daratan Jakarta
- 4. Pembangunan tanggul pantai dan sungai** di daratan Jakarta
- 5. Penataan sistem drainase** di Daratan Jakarta



PENGEMBANGAN JAKARTA WATERFRONT CITY JANGKA PANJANG

Jakarta Water Front City Jangka Panjang



Pembangunan Tanggul Raksasa akan disinergikan dengan Pembangunan Kota Waterfront yang berdaya saing tinggi dan kelas dunia



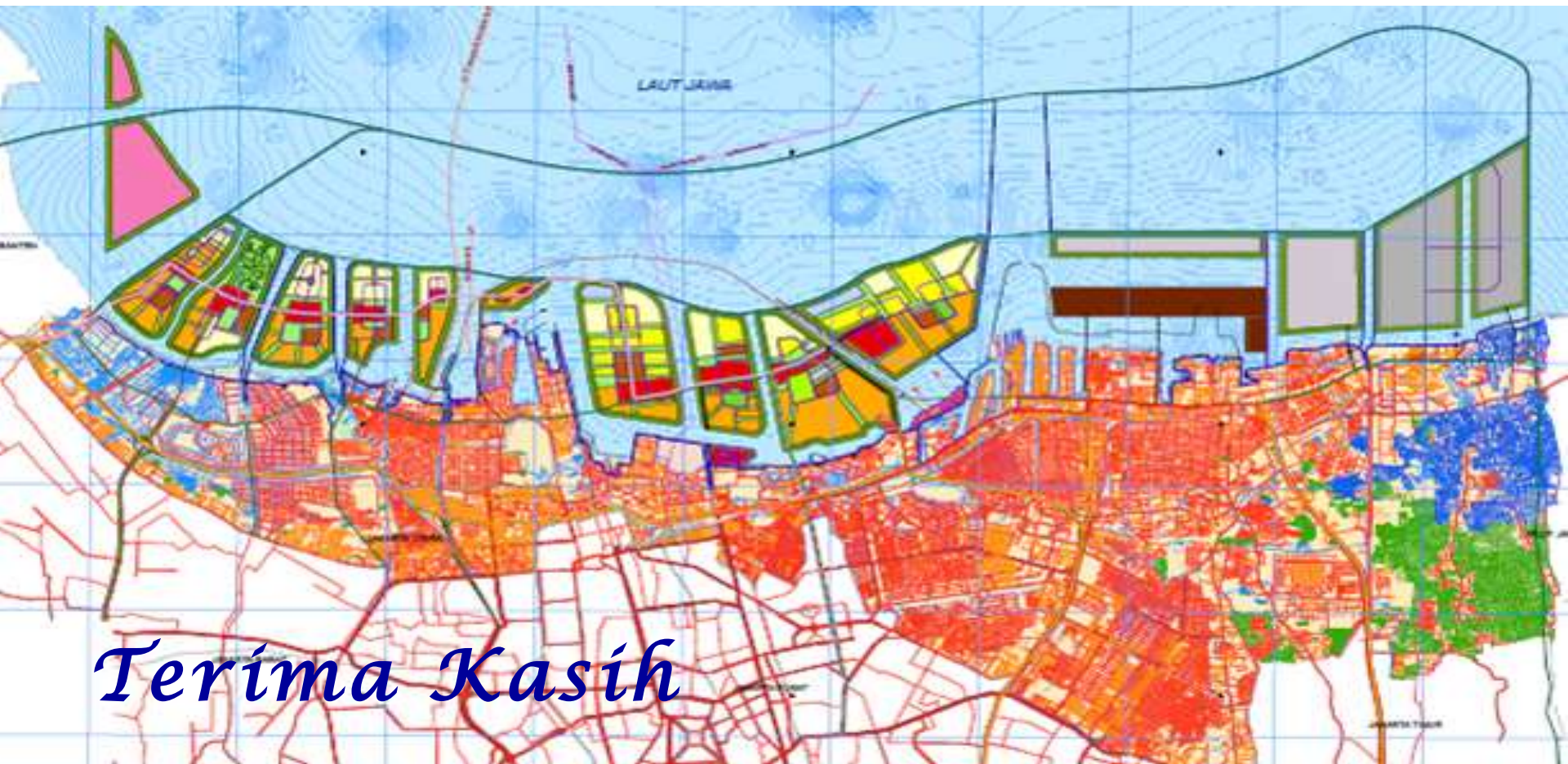
Program yang akan dilaksanakan:

- Pembangunan Kawasan Reklamasi
- Pengembangan kawasan rekreasi
- Penyediaan Jalur Angkutan Umum Massal dan Jalan Tol
- Penyediaan Air Bersih dari Sumber Alternatif
- Pengelolaan sanitasi dan limbah
- Pemeliharaan dan Normalisasi Sungai
- Pembangunan dan Pemulihan Reservoir dan Situ
- Pengembangan Pelabuhan

Yang Saat Ini Sedang Dikerjakan



1. Penyusunan Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta
2. Penyusunan Peraturan Gubernur terkait Pantura. a.l:
 - Pergub tentang Ketentuan Teknis Pembangunan Pulau Reklamasi Pantura Jakarta
 - Pergub tentang Ketentuan Teknis lainnya
 - Pergub tentang mekanisme Perizinan Pantura (masa transisi ketika Perda Pantura belum disahkan)
3. Pembentukan Kelembagaan Baru Pengelola Kawasan Strategis Pantura Jakarta (pengganti BP. Pantura)



Terima Kasih